

BAB VI

PENUTUP

VI.1. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisa dan pembahasan studi ini adalah sebagai berikut:

1. Alokasi pemerintah pusat yakni Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pendidikan pemerintah kabupaten/kota. Sebagian besar DAU digunakan oleh pemerintah kabupaten/kota tersebut untuk pengeluaran rutin seperti terutama belanja pegawai. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota belum sepenuhnya mengalokasikan DAU sesuai dengan formula yang telah ditetapkan.
2. Indikator lain desentralisasi fiskal yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pendidikan pemerintah kabupaten/kota. Hal tersebut dikarenakan adanya DAK bidang pendidikan merupakan *specific grant* yakni alokasi pemerintah pusat yang penggunaannya juga ditentukan pusat. Sehingga tertutup kemungkinan pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana DAK pendidikan tersebut untuk keperluan diluar sektor pendidikan.
3. DAK pendidikan berpengaruh kecil terhadap akses pendidikan SD, SLTP dan SLTA sebesar 0.01812. Dari hasil tersebut terlihat bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah masih sangat kecil pengaruhnya terhadap akses pendidikan masyarakat.
4. Pengeluaran pemerintah kabupaten/kota lebih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan lingkungan masyarakat daripada alokasi dari pemerintah pusat (DAK pendidikan)
5. Tingkat akses pendidikan masyarakat juga lebih dipengaruhi dari sisi permintaan masyarakat akan pendidikan yakni kondisi ekonomi dan lingkungan masyarakat

6. Pengeluaran pendidikan pemerintah kabupaten/kota ternyata dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan tingkat SD, SLTP dan SLTA atau *Gross Enrolment Rate* (GER) tingkat SD, SLTP dan SLTA meskipun nilai elastisitasnya kecil.
7. Kebijakan desentralisasi ternyata dapat mendorong peningkatan pengeluaran pendidikan pemerintah kabupaten/kota dan perbaikan akses masyarakat terhadap pendidikan atau *gross enrolment rate* (GER) tingkat SD, SLTP dan SLTA dibandingkan dengan era sebelum desentralisasi.
8. Faktor yang menyebabkan GER meningkat karena adanya kebijakan desentralisasi adalah adanya stimulasi anggaran dari pemerintah pusat untuk bidang-bidang pelayanan dasar masyarakat seperti DAK Non DR bidang pendidikan yang mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran pendidikan. Oleh karena pengeluaran pendidikan berpengaruh signifikan terhadap GER tingkat SD, SLTP dan SLTA maka peningkatan alokasi anggaran pendidikan akan meningkatkan GER walaupun tingkat pengaruhnya relatif kecil.

VI.2 Saran

VI.2.1 Saran Kebijakan

Menurut penulis dari hasil studi ini dimana DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pendidikan padahal DAU semakin meningkat sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota belum sepenuhnya mengalokasikan DAU sesuai dengan ketentuan formula DAU yang telah ditetapkan dimana terdapat perhitungan indeks pembangunan manusia (pendidikan). Alokasi DAU lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai.

Untuk mencapai sasaran pendidikan, Pemerintah pusat sebaiknya melakukan stimulasi anggaran khusus untuk pelayanan pendidikan seperti DAK pendidikan yang dapat memperkecil kemungkinan pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana DAK pendidikan tersebut untuk keperluan diluar sektor pendidikan. Saran tersebut didukung dengan DAK yang merupakan salah satu stimulasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pendidikan pemerintah kabupaten/kota. Dengan alokasi anggaran pendidikan melalui DAK, pemerintah kabupaten/kota tidak akan mengalokasikan anggaran tersebut untuk pengeluaran selain bidang pendidikan sehingga alokasi anggaran pendidikan dapat mencapai sasaran.

Akan tetapi, pengaruh DAK pendidikan masih relatif kecil terhadap akses pendidikan dibandingkan dengan sisi permintaan masyarakat akan pendidikan. Pemerintah sebaiknya meningkatkan pengawasan alokasi pengeluaran pendidikan dan memperkecil kemungkinan penyimpangan DAK pendidikan tersebut sehingga lebih tepat sasaran.

Selain dari sisi *supply*, untuk meningkatkan akses pendidikan, pemerintah juga sebaiknya mendorong masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat dalam pendidikan. Saran tersebut berdasarkan hasil regresi yang menunjukkan faktor yang berpengaruh besar terhadap akses pendidikan adalah tingkat pendapatan per kapita masyarakat.

VI.2.2. Saran Penelitian Selanjutnya

Penulis menyadari bahwa studi yang telah dilakukan ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Keterbatasan studi yang dihadapi penulis diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya sehingga dikemudian hari dapat dilakukan penyempurnaan studi untuk hasil yang lebih baik. Beberapa keterbatasan studi yang dimiliki oleh studi ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel tingkat buta huruf dewasa diambil dari tingkat buta huruf dewasa diatas 18 tahun. Data tingkat buta huruf dewasa tersebut belum mencerminkan tingkat buta huruf orang tua. Diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan data tingkat buta huruf dewasa diatas 25 tahun.
2. Data yang digunakan hanya data kabupaten/kota di Pulau Jawa sehingga kurang menggambarkan keadaan keseluruhan di Indonesia
3. Beberapa faktor lain yang berperan penting mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan seperti ketersediaan guru dan sekolah tidak dimasukkan dalam studi kali ini. Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan variabel-variabel tersebut sehingga dapat mendekati gambaran GER sebenarnya.

